

TINJAUAN HISTORIS TENTANG KETERLIBATAN MILITER DALAM PEMERINTAHAN SOEHARTO PADA MASA AWAL ORDE BARU

Prihatanti, Maskun dan Syaiful M.

FKIP UnilaJalan. Prof. Dr. SoemantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

e-mail:priha.tanti@yahoo.com

Hp. 085279214108

The purpose of this study was to figure out the military involvement during Soeharto's presidential term in the early of the new order. This research applied historical method. The data collection techniques employed literary reviews and documentation;while qualitative data analysis was used to analyze the data. The result found out that in the early of the new order, several military members served in the post of governors and ministers during the development cabinet I and II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto di bidang birokrasi pada masa awal orde baru. Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pada masa awal orde baru militer di bidang birokrasi terdapat beberapa anggota militer yang memangku jabatan gubernur, serta sebagai menteri pada kabinet pembangunan I dan II.

Kata kunci : keterlibatan, militer, orde baru

PENDAHULUAN

Orde Baru lahir dari tekad untuk melakukankoreksi total atas kekurangan sistem politik yang telah dijalankan sebelumnya.Dengan kebulatan tekad atau komitmen dari segala kekurangan pada masa sebelumnya, Orde Baru merumuskan tujuannya secara jelas yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto dalam salah satu pidatonya“Koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau itulah yang melahirkan Orde Baru.Ialah, tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Sejarah lahirnya Orde Baru ini harus kita camkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati dan kesadaran kita semua tanpa kecuali” (Departemen Pertanian, 1994:6).

Sejak permulaan Pemerintahan Orde Baru tahun 1966, yang sejalan dengan pergeseran pusat perhatian dari masalah pembinaan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi, muncul perhatian yang serius untuk menata kembali suatu sistem politik yang diharapkan akan dapat menunjang kegiatan pembangunan ekonomi tersebut.

Proses ini semakin jelas ketika negara, karena prioritas pembangunan ekonominya yang berorientasi pada pertumbuhan, mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi Internasional yang bercorak orientasi pada pertumbuhan dan keterikatan internasional mempunyai signifikasi tertentu dalam memahami karakteristik kepolitikan dan birokrasi di Indonesia (Manuel Kaisiepo, 1987: 14).

Dalam membangun sistem potitik yang dapat menjamin stabilitas sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan sebagaimana

tercermin dalam pembangunan Nasional Jangka Panjang Pertama mulai di lakukan juga serangkaian usaha untuk menyetatkan kembali birokrasi pemerintahan sebagai instrumen penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan (ekonomi) tersebut. Ini berarti usaha menciptakan suatu sistem birokrasi modern yang efisien dan efektif (Mohtar Mas'ood, 1987:7).

Rezim Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu, baik kekacauan politik, ekonomi, maupun budaya pada masa Orde Lama dengan Soekarno sebagai presiden.

“Pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah” (Ali Moertopo, 2004:48).

Pemerintahan Orde Baru adalah suatu penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal koreksi terhadap penyelewengan pada masa yang lalu. Orde Baru bisa diartikan sebagai orde yang mempunyai sikap dan tekad mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional yang didasari oleh falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi asas serta sendi Undang-undang Dasar 1945.

“Orde Baru juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang tertib dan negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta warga negara mempunyai pemimpin atau penguasa yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku” (Jenderal Soeharto, 1967:7).

“Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar itulah yg menjadi titik awal lahirnya Orde Baru” sebab dengan Supersemar itulah kemudian Soeharto membubarkan PKI dan mengambil tindakan-

tindakan pembaharuan dan stabilisasi politik, dengan Supersemar itulah sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan sistem politik

Demokrasi Terpimpin menjadi lenyap. Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS yang melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan.

Pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Soeharto sebagai Presiden (Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1984: 415).

Pengertian, ciri-ciri dan hakekat Orde Baru sebagai yang dirumuskan oleh seminar II Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 adalah “Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakan pentingnya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang menegembangkan kultur individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan.

Orde Baru menghendaki pengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru adalah suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945” (Nugroho Notosusanto, 1985: 31).

Keterlibatan militer dalam penyusunan agenda Orde Baru yang memang untuk menyiapkan militer memimpin rezim ini, berimbas besar terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat sepanjang masa Orde Baru.

Militer dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun Orde Baru untuk

menunjang dan menjalankan kekuasaannya, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, militer menjadi peran utama. (Eddy Budiarmo, 2000:2-3).

Untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Soekarno dan unsur PKI dalam pemerintahan, maka usaha yang dilakukan Orde Baru adalah mengamankan agenda Politik Pemilu yang direncanakan pada tahun 1968 dari partai-partai lama yang diduga masih tersimpan sisa-sisa pengaruh Soekarno. Dari sini muncullah konsep perombakan struktur politik oleh Ali Moertopo yang dikenal dengan istilah "Strategi Politik Nasional".

Dalam bukunya Strategi Politik Nasional, Ali Moertopo menulis "Bahwa penataan kehidupan politik yang dirancang pada awal Orde Baru diarahkan agar secepat mungkin dapat dicapai stabilisasi kehidupan politik dan penyederhanaan struktur kepartaian, introduksi pengangkatan dalam anggota DPR dan MPR, dan format Pemilu berikut 12 consensusitem tentang itu yang dicapai antara kekuatan-kekuatan politik sipil dari partai, kalangan ABRI (TNI-AD), dan pemerintah dibuat dalam rangka mendukung ide stabilisasi politik dan ekonomi tersebut" (Ali Moertopo, 2004:22).

Angkatan Darat Indonesia berbeda dengan kebanyakan angkatan darat pada umumnya yang telah merebut kekuasaan politik, karena tidak pernah sebelumnya menganggap diri sebagai suatu organisasi yang tidak berpolitik. Dari awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politiknya di bawah Orde Baru, para perwira Angkatan Darat Indonesia senantiasa melibatkan dirinya ke dalam masalah-masalah politik dan hampir sepanjang masa itu dengan giat memainkan peranan politik yang penting.

Dengan keikutsertaan sepenuhnya dalam perjuangan nasional melawan kekuasaan belanda itu, kebanyakan perwira tersebut merasa bahwa suara mereka harus didengar dalam urusan politik di masa sesudah kemerdekaan. Sesudah berlaku undang-undang keadaan perang tahun 1957, hak peran serta mereka itu diberi pengakuan

resmi melalui pengangkatan-pengangkatan dalam kabinet, parlemen dan administrasi.

Semasa zaman Demokrasi Terpimpin, Angkatan Darat menjadi salah satu dari dua kekuatan politik penting yang terorganisasi, dan bersama dengan Presiden Soekarno menguasai politik dewasa itu. Akhirnya pembersihan Angkatan Darat terhadap PKI tahun 1965 dan keberhasilannya dalam menurunkan Presiden Soekarno dari kedudukannya, menjadikan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya di atas panggung politik Indonesia (Harold Crouch, 1986 :389).

Pada awal Orde Baru keterlibatan militer secara aktif bertujuan untuk memulihkan krisis nasional yang terjadi akibat pemberontakan G30-S/PKI karena pada saat itu kondisi atau situasi politik di Indonesia tidak menentu dan terjadi krisis ekonomi, sehingga militer turut serta dalam usaha mempertahankan dan mengisi pembangunan bangsa.

Keterlibatan militer ikut menentukan status kepengurusan dalam organisasi kemasyarakatan maupun sosial politik pada masa Orde Baru tidak hanya mendominasi peran sosial politik saja juga dibidang ekonomi. Dengan tujuan agar dapat menjamin mengalirnya dan tetap ke kas Angkatan Darat, sehingga banyak perwira AD yang ditugaskan di berbagai sektor ekonomi, seperti perusahaan minyak negara yaitu Pertamina yang merupakan salah satu BUMN yang dipakai AD untuk mengisi kas mereka dan perusahaan lainnya yaitu Bulog (Badan Urusan Logistik).

Keterlibatan militer dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial politik dalam upaya membangun bangsa bukan untuk memperoleh jabatan diluar bidangnya atau jabatan sipil (Indria Samego, 1998:59).

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto pada masa awal Orde Baru. Menurut A.S.S. Tambunan dalam Selo Soemardjan, ABRI adalah angkatan bersenjata yang lahir dan tumbuh dengan kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan (Soemardjan, 199:7).

Menurut A.H Nasution Pidato Dies Natalis Akademi Militer Nasional pada tahun 1958 dalam Soebijono dkk, bahwa yang dimaksud ABRI adalah : “Bahwa ABRI perlu ikut dalam pembinaan negara, karena kalau dibendung adalah laksana kawah gunung merapi, yang pasti dalam waktu akan meledak. Ia adalah sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dengan kekuatan rakyat lainnya “. (Soebijono, 1992:86).

Soebijono dkk, Panglima Besar Jenderal Sudirman menegaskan mengenai apa, siapa, dan bagaimana ABRI, “ABRI lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945, hidup dengan Proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian proklamasi tersebut, satu-satunya hak milik nasional republik yang masih tetap utuh tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala soal perubahan, adalah hanya ABRI.

Kewajiban bagi kita sekalian, yang senantiasa hendak mempertahankan tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945 untuk tetap memelihara, agar satu-satunya hak milik nasional yang masih utuh itu tidak berubah-ubah oleh keadaan bagaimanapun”(Soebijono, 1992:84-85).

Pada Orde Baru sesuai dengan keputusan presiden no 132/1967, maka ABRI terdiri atas :Angkatan Darat disingkat AD, Angkatan Laut disingkat AL, Angkatan Udara disingkat AU, Angkatan Kepolisian disingkat AK, (Poesponegoro, Notosusanto, 1993:464)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka ABRI adalah angkatan bersenjata yang ikut dalam pembinaan negara sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dalam mewujudkan, membela dan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan kemurnian Proklamasi. Dan kemudian pada masa Orde Baru ABRI terdiri dari AD, AL,AU dan AK.

Dwifungsi ABRI menurut Soebijono ialah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus (Soebijono, 1992:1).

Pengertian Dwifungsi ABRI yaitu sebagai penugasan tentara yang masih aktif dalam tugas non-militer, khususnya dalam

lembaga-lembaga pemerintahan baik yang legeslatif (DPR, MPR) maupun eksekutif (dari lurah sampai menteri)(Soebijono, 1992:58).

Pengertian Dwifungsi ABRI menurut Soebiyanto dalam Muhammad Rusli Karim: “Bahwa ABRI itu mempunyai 2 (dua) fungsi, ialah sebagai kekuatan HANKAM maka ABRI merupakan aparatur Negara atau Pemerintah, ABRI menjalankan fungsi HANKAMNAS untuk mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa terhadap serangan/ancaman/bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial ABRI merupakan salah satu golongan karya yang ikut secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat dan negara di semua bidang dalam rangka pencapaian tujuan Nasional” (Karim, 1991:59).

Hakikat Dwifungsi ABRI adalah jiwa dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan rakyat lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang kesejahteraan nasional, maupun di bidang pertahanan keamanan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945(Notosusanto, 1994:170).

Dwifungsi ABRI adalah ABRI tidak hanya memiliki peran di bidang pertahanan dan keamanan saja tetapi ABRI juga memiliki peran di bidang sosial.

Peran sosial ABRI ini meliputi bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi dan budaya.Dan Dwifungsi ABRI di Implementasikan dengan dikaryakan ABRI diluar bidang hankam khususnya di Birokrasi pemerintahan.

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Presiden ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun (1968-1973) dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968.

Menurut ketetapan MPRS No.XLI/MPRS/1968 kabinet yang harus dibentuk adalah Kabinet Pembangunan.

Ketetapan tersebut otomatis Kabinet Ampera harus Domissioner, diganti kabinet baru yang sudah diberi nama Kabinet

Pembangunan. Sebagai realisasi terhadap Kabinet Pembangunan adalah tanggal 6 Juni 1968 susunan Menteri Kabinet Pembangunan terbentuk dan diumumkan.

Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Kabinet ini merupakan Kabinet Presidensial sebagaimana kabinet lain sejak kita kembali ke UUD 1945 (Bibit Suprpto, 1985:341).

Dalam negara yang bersistem Kabinet Presidensial, domissionernya kabinet karena adanya reformasi kabinet (Regrouping Kabinet Zaman Orde Lama) atau Reshuffle kabinet secara keseluruhan untuk semua menteri dalam kabinet, walaupun kabinet sebenarnya masih mampu memerintah. Seperti halnya Kabinet Pembangunan I domissioner ketika Kabinet Pembangunan II terbentuk/diumumkan tanggal 27 Maret 1973 tepat pukul 19.20 WIB dan dilantik pada esok harinya tanggal 28 Maret 1973 (Bibit Suprpto, 1985:360-361).

Dari kutipan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pelita I dan II termasuk dari awal Orde Baru, karena pada awal Orde Baru itu lah dan pada saat Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden tahun 1968, dan pada saat itu juga Kabinet Pembangunan I di bentuk dan dilantik pada 6 Juni 1968 kemudian berkesinambungan dengan Kabinet Pembangunan II.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama untuk yang digunakan untuk mencapai tujuan misalnya untuk menguji hipotesis dengan mempergunakan tehnik serta alat-alat tertentu (Winarno Surachmad, 1982:111). Hal tersebutlah yang memengaruhi keberhasilan dalam suatu penelitian. Maka dari itu seorang peneliti harus dapat memilih metode yang tepat dan sesuai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau masalah.

Selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat digunakan untuk meramal kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Dengan metode historis adalah sebuah peneliti dapat memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan data-data masa lalu berupa peninggalan-peninggalan dengan tujuan untuk merekonstruksi masa lalu tersebut dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga menghasilkan sebuah jawaban atas permasalahan tersebut secara utuh berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang diperoleh.

Variabel penelitian adalah tujuan yang akan menjadi bahan pengamatan suatu penelitian, dimana variabel akan menjadi suatu permasalahan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Variabel yang akan dijadikan penelitian tersebut harus dimulai dari arah mana dan diakhiri dengan arah yang sesuai dengan tujuan dari adanya suatu tumpang dalam melakukan penelitian.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal yakni variabel yang kuat pengaruhnya untuk dapat berdiri sendiri, dengan fokus kajian pada keterlibatan militer di bidang birokrasi pada masa awal Orde Baru (Suharsimi Arikunto, 1989: 91).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Menurut Hadari Nawawi (1993: 133), Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Oleh karena dalam penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting terutama dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik kepustakaan, peneliti berusaha untuk mempelajari dan menelaah buku-buku guna memperoleh data-data dan informasi berupa teori-teori atau argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu keterlibatan militer di bidang birokrasi pada masa awal Orde Baru.

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peningkatan tertulis berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam hal ini peneliti akan mencari sumber-sumber lain seperti majalah, koran, brosur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Melalui teknik ini penulis mengumpulkan berbagai bahan baik berupa tulisan maupun gambar-gambar yang berkenaan dengan masalah yang peneliti bahas yakni keterlibatan militer di bidang birokrasi pada masa awal Orde Baru. (Hadari Nawawi, 1993: 27).

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang mengelompokkan, membuat suatu manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah dicerna.

Dalam mengadakan analisis data perlu diingat bahwa data yang diperoleh hanya menambahkan keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Dan informasi merupakan data yang dapat menjawab sebagian ataupun dari masalah yang diteliti yaitu tentang keterlibatan militer di bidang birokrasi pada masa awal Orde Baru (Mohammad Nasir, 1988:419).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh arti dari data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif, dan bermuatan kualitatif diantaranya berupa catatan lapangan serta pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan.

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif maka peneliti akan terbimbing dalam memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu peneliti dapat menyajikan hasil yang diteliti yaitu tentang keterlibatan militer di bidang birokrasi pada masa awal Orde Baru (Mohammad Ali. 1992:171).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berakhirnya masa Orde Lama dan awal masa Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pemberontakan yg dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1966. Kudeta gagal yg dilakukan oleh PKI ini menyebabkan negara mengalami kegoncangan. Sejak peristiwa G.30.S/PKI itu

krisis politik terus meningkat yang ditandai oleh gelombang demokrasi kurang lebih selama 60 hari di ibu kota. Para pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menyebut dirinya angkatan 66 mengadakan demonstrasi pada tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan tuntutan yang dikenal dengan TRI TURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi 1) Bubarkan PKI, 2) Bersihkan kabinet dari unsur G.30.S/PKI, 3) Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Pengertian, ciri-ciri, dan hakekat Orde Baru sebagai yang dirumuskan oleh seminar II Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 adalah "Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakan pentingnya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang menegembangkan kultur individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan.

Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru adalah suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945" (Nugroho Notosusanto, 1985: 31).

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama telah terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, maka Orde Baru sebagai corak kehidupan bangsa yang baru berusaha mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 untuk memperbaiki semua segi kehidupan Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Presiden Soekarno yang selama ini dekat dengan PKI tidak mampu lagi mengatasi semua kekacauan yang terjadi karena ia mulai kehilangan kepercayaan dari

rakyat, hal ini merupakan konsekuensi logis dari sikap politik Soekarno pada masa-masa sebelum yang cenderung mendukung dan memberikan kesempatan kepada PKI untuk berkembang.

Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia pada waktu itu tengah terpuruk. Inflasi yang tinggi ditambah dengan sikap Soekarno yang tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan kudeta menyebabkan keadaan semakin menjadi kacau.

Soekarno yang sudah tidak mampu lagi mengendalikan jalannya pemerintahan kemudian mengeluarkan surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Tinggi Angkatan Darat yang isinya antara lain memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk menjamin keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

“Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar itulah yg menjadi titik awal lahirnya Orde Baru” sebab dengan Supersemar itulah kemudian Soeharto membubarkan PKI dan mengambil tindakan-tindakan pembaharuan dan stabilisasi politik. Dengan Supersemar itulah sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan sistem politik Demokrasi Terpimpin menjadi lenyap.

Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS yang melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Soeharto sebagai Presiden (Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984: 415).

Dari berbagai pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa Orde Baru adalah suatu upaya untuk menata kembali kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara dalam hal ideologi, politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, setelah keberhasilan Bangsa Indonesia menyelamatkan pemerintahan dari peristiwa G 30 S oleh PKI.

ABRI pada masa Orde Baru selalu diikuti sertakan dalam program pembangunan, salah satunya yaitu “ Adapaun modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional ialah : (a) Kemerdekaan dan Kedaulatan bangsa, (b) Kedudukan geografi, (c) Sumber-sumber kekayaan alam, (d) Jumlah penduduk, (e) Modal rohaniah dan mental, (f) Modal budaya, (g) Potensi efektifitas bangsa, (h) Angkatan bersenjata (Marwati Djoenet Poesponegoro, Notosusanto, 1993:442).

Pada masa Orde Baru di bidang eksekutif ABRI menyumbangkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk melaksanakan tugas negara dan pemerintahan di banyak bidang mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, di pusat maupun daerah.

Di samping itu ABRI juga menyumbangkan gagasan dan fikirannya berupa konsep-konsep kepada pemerintah, maka ABRI sebagai kekuatan sosial politik selalu membantu pelaksanaan program-program Repelita untuk mencapai cita-cita Orde Baru (Soebijono, 1992:40).

Keterlibatan militer dalam sebuah tatanan kehidupan perpolitikan Indonesia. Hal ini dimulai ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957, setelah peranan partai-partai politik (dengan pengecualian PKI) dilumpuhkan dan UU Damra diberlakukan. Dan tujuan dari dibentuknya Dewan Nasional adalah para membantu kabinet dalam menjalankan program-programnya tapi pada kenyataannya dimaksudkan untuk mengambil alih peranan partai-partai politik. Kekuatan militer semakin meningkat pesat sesudah tahun 1957, tidak hanya dalam bidang militer tetapi juga dalam bidang non militer. Setelah kudeta 1965 yang merupakan awal dari pemerintahan Orde Baru yang juga merupakan awal bagi militer untuk menjalankan kekuasaannya dalam sebuah birokrasi politik Indonesia (dee's aida.blogspot.com/2010/12/html).

Jendral Soeharto selaku pimpinan militer berupaya menggunakan suatu organisasi sebagai mesin pemilu untuk memperkuat dan mempertahankan kepentingan dan kedudukan tentara dalam pemerintahan.

Organisasi yang dipilih Jendral Soeharto untuk mempertahankan dan memperkuat kedudukan tentara jatuh pada Sekber-Golkar.

Militer ternyata berhasil menggunakan Sekber-Golkar untuk memperkuat kekuasaannya dalam pemerintahan. Sekber-Golkar yang dulunya hanya sebuah organisasi politik kini berubah menjadi sebuah politik yang besar dimasa orde baru yang kemudian akan memenangkan sebuah pemilihan umum pada masa Orde Baru (dees' aida.blogspot.com/2010/12/html).

Munculnya partai Golkar sebagai kekuatan baru sering dianggap sebagai kekuatan Orde Baru karena dalam kekuatan ini Golkar di dukung oleh 3 kekuatan dominan orde baru, yaitu :

(1) ABRI sebagai kekuatan kunci untuk melakukan tekanan atas kekuatan sipil yang mencoba mengganggu eksistensi Golkar, (2) Birokrasi dalam hal ini dibentuknya kokarmendagri sebagai cikal bakal munculnya "monoloyalitas" pegawai negeri kepada Golkar dan akhirnya dikukuhkan melalui KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) dan (3) Golkar dijadikan alat "orde baru" untuk melanggengkan kekuasaannya melalui formulasi yang dianggap demokratis dengan tata cara dan prosedur pemilihan umum, sidang umum MPR dan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Sundhaussen, Ulf. 1986: 32).

Eksistensi militer dalam birokrasi pemerintahan Indonesia dapat kita lihat dari banyaknya anggota militer yang duduk dan menjabat dalam sebuah parlemen atau dalam sebuah lembaga pemerintahan.

Jabatan Menteri pimpinan departemen pada kabinet pembangunan I ada 24 departemen dimana dari 24 departemen tersebut terdapat 6 anggota ABRI/Militer yang dikaryakan untuk menjabat sebagai menteri pimpinan departemen.

Jumlah 6 militer yang dikaryakan yaitu pada posisi jabatan : menteri dalam

negeri, menteri pertahanan keamanan, menteri penerangan, menteri perindustrian, menteri tenaga kerja dan menteri transmigrasi.

Jabatan menteri pimpinan pada kabinet pembangunan II ada 27 anggota Menteri. Untuk bagian Menteri departemen terdapat 19 anggota. Untuk anggota departemen tersebut yaitu 3 anggota ABRI/militer yang dikaryakan untuk menjabat sebagai menteri pimpinan departemen.

Jumlah 3 ABRI yang dikaryakan yaitu pada posisi jabatan : Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, dan Menteri Perindustrian.

Menteri-Menteri Negara terdapat 5 anggota, yaitu 1 anggota ABRI/Militer yang dikaryakan untuk menjabat menteri negara tersebut. Jumlah 1 ABRI yang dikaryakan yaitu pada posisi jabatan : Menteri/Sekretaris Negara. Dan untuk Pimpinan Lembaga Negara Yang Erat Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Kabinet Pembangunan II terdapat 2 anggota ABRI/Militer yang dikaryakan untuk menjabat pimpinan tersebut yaitu pada posisi jabatan : Jaksa Agung dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Wakil Panglima Angkatan Bersenjata.

Dari susunan-susunan kedua kabinet tersebut dapat kita lihat bahwa militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan keamanan namun dalam bidang yang lain pun militer juga ikut terlibat di dalamnya.

Militer berhasil dalam melangkahi lembaga-lembaga lain yang secara konvensional berkaitan dengan masalah-masalah politik luar negeri, seperti Departemen Luar Negeri Komisi 1 DPR dan Bappenas yang berwenang dalam masalah-masalah ekonomi dalam negeri dan luar negeri.

Pada awalnya ada pertentangan antara militer dengan departemen luar negeri. Namun dalam hal ini militerlah yang muncul sebagai pemenang. Akhirnya Jendral Soeharto sebagai pemimpin militer telah berhasil membawa militer ke puncak kejayaan pada masa Orde Baru.

Terlibatnya militer pada Departemen Dalam Negeri bahwa Gubernur yang ditempatkan pada tiap propinsi pada masa

Orde Baru berjumlah 73 orang, dimana jumlah militer yang menjabat sebagai gubernur dengan jumlah 24 orang.

Meskipun dari total keseluruhan jumlah tetap sipil yang mendominasi, namun ada beberapa daerah yang menunjukkan bahwa dominasi militer pada jabatan gubernur.

Dari data di atas propinsi yang mendominasi militer yaitu Daerah Jawa Barat karena dari beberapa pergantian gubernur pada masa Orde Baru militer yang tidak ada dominasi militer yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Irian Jaya dan Timor Timur.

Pada tahun 1966-1970 Militer yang ditempatkan pada jabatan gubernur berjumlah 8 orang sedangkan untuk sipil berjumlah 34 orang yang menjabat sebagai gubernur. Dari 27 propinsi, 8 militer yang ditempatkan pada propinsi : Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1971-1978 militer yang ditempatkan pada jabatan gubernur berjumlah 15 orang sedangkan untuk sipil berjumlah 21 orang yang menjabat sebagai gubernur.

Dari 27 propinsi, 15 militer yang ditempatkan pada propinsi : Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya.

Pejabat tinggi setingkat menteri pada Orde Baru, yaitu Jaksa Agung, Gubernur Bank dan Panglima komando operasi keamanan dan ketertiban (Pangkopkamtib).

Pada kabinet I terdapat dua anggota militer yang dikaryakan yaitu di Jaksa Agung dan Pangkopkamtib. Namun setelah itu, pada kabinet pembangunan II pengkaryaan militer tetap atau stabil yaitu hanya di Pangkopkamtib.

Maka pada awal Orde Baru yakni pejabat setingkat menteri dijabat oleh anggota militer yang mungkin dalam pelaksanaannya dalam upaya menstabilkan keadaan yang pada

saat itu Indonesia baru melangkah ke Pembangunan nasional.

Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya pejabat setingkat menteri dijabat oleh sipil kecuali pada posisi Pangkopkamtib dijabat oleh anggota militer yang memang sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara Indonesia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pejabat tinggi setingkat menteri pada kabinet pembangunan I, yaitu Letjen Soeharto menjabat sebagai Jaksa Agung, Drs. Radius Prawiro menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral, Jenderal Maraden Panggabean menjabat sebagai Pangkopkamtib (Bibit Suprpto, 1985 : 347)

Kabinet pembangunan Pada awal Orde Baru keadaan sosial politik maupun perekonomian bangsa Indonesia belum stabil maka pada kabinet pembangunan I pada pejabat setingkat menteri ketiga jabatan tersebut dua diantaranya dijabat oleh militer yaitu Jaksa Agung dan Pangkopkamtib, sedangkan pada Gubernur Bank Sentral dijabat oleh Sipil.

Kabinet pembangunan I yakni pada tahun 1968-1973 dipimpin oleh Presiden Soeharto, namun kabinet pembangunan I hanya berlangsung 5 tahun kemudian digantikan dengan kabinet pembangunan II. Pejabat tinggi setingkat menteri pada kabinet pembangunan II, yaitu Ali Said menjabat sebagai Jaksa Agung: Rachmat Saleh menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral, Sumitro menjabat sebagai Pangkopkamtib (Bibit Suprpto, 1985 : 363).

Kabinet pembangunan II ini berlangsung dari tahun 1973-1978 dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kabinet pembangunan II ini hanya berlangsung 4 tahun. Pada kabinet pembangunan II ini pejabat setingkat menteri yang militer hanya di Pangkopkamtib yaitu Jenderal Sumitro sedangkan Jaksa Agung dan Gubernur Bank Sentral dijabat oleh sipil. Pada masa Orde Baru salah satu perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik dalam usaha menegakkan dan mencapai cita-cita Orde Baru ialah penugasan prajurit ABRI dalam

lembaga/instansi/badan/organisasi diluar jajaran ABRI sebagai pelaksanaan dari dwifungsi ABRI.

Maksud dan tujuan tersebut pertama-tama ialah dalam rangka pengamanan politis ideologis terutama pada saat awal Orde Baru dan kemudian dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, untuk menjamin tercapainya sasaran program-program pembangunan yang terdapat dalam repelita-repelita.

Penugasan dalam rangka pengamanan dapat dibaca dalam pidato kenegaraan Pj. Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1967 yang antara lain menyebutkan bahwa "Dalam perkembangan politik dan kenegaraan dengan asas demokrasi Pancasila, golongan kerja yang potensial dan mempunyai peranan yang aktif dan besar untuk mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah golongan karya ABRI.

Besar kecilnya peranan ABRI itu tergantung pada bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bahaya yang mengancam keselamatan rakyat, kesatuan dan persatuan bangsa, serta kelangsungan hidup negara, baik bahaya itu datang dari luar maupun dari dalam".

Adapun penugasan prajurit ABRI dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dalam Amanat Presiden Soeharto pada RAPIM ABRI tanggal 23 Februari 1970 yang menekankan bahwa "ABRI hari dapat menjadi kekuatan modernisasi masyarakat, menggerakkan pembangunan oleh masyarakat sendiri, justru karena ABRI sangat kaya dengan pengalaman dalam membina masyarakat pada masa-masa sulit dulu, karena sistem organisasinya yang baik, karena sifatnya pragmatis, karena jiwanya perbandingannya kepada kepentingan nasional dan karena ketegasan dalam kepemimpinannya".

Setahun Sebelum Presiden Soeharto, Dalam RAPIM ABRI tanggal 3 Maret 1969 menegaskan harapannya dari mereka yang ditugaskaryakan sebagai berikut : "Semangat kopr, loyalitas kepada tugas, disiplin, organosasi yang lincah, prosedur dan tata kerja yang jelas, sistem pertanggungjawaban yang tegas, tanggung jawab pimpinan yang penuh, delegasi kekerasan ke bawah dan

sebagainya adalah prinsip-prinsip umum dan manajemen yang dimiliki oleh ABRI.

Setiap anggota ABRI yang di beri tugas karya harus menyebarkan secara positif semangat dan teknik berorganisasi yang baik". Terlihat jelas apa yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto, bahwa pertimbangan penempatan prajurit ABRI di bidang non-hankam intinya berkisar pada segi kepemimpinan, kemampuan manajemen dan sifat-sifat khas prajurit ABRI.

Di tiap lembaga negara/pemerintahan dimana terdapat karyawan ABRI, misalnya DPR, Departemen/Lembaga Non Departemen, pembinaan dilakukan oleh seorang karyawan senior yang ditunjuk oleh masing-masing angkatan/Polri. (Soebijono,1992:157).

Secara normatif, semua penugasan ABRI dilakukan atas permintaan dan dilaksanakan secara selektif jadi tidak semua permintaan harus dipenuhi karena tergantung pada urgensi dan tersedianya tenaga yang memenuhi persyaratan. Namun pada pelaksanaan kekaryaan ABRI yang setelah ditempatkan tidak dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan.

Pada tingkat Implementasi, keterlibatan militer dijalur non-hankam sering ABRI tidak sesuai dengan kualitas normal, keahlian, maupun pengalaman teknis sehingga banyak mengacu kepada fungsi stabilisator dan dinamisator (UU No. 20 tahun 1982, pasal 28 (1) (Samego,1998:98).

Pada awal Orde Baru, keterlibatan militer dalam masalah-masalah non-hankam dimaksudkan untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan.

Kedudukan anggota militer dalam posisi dimaksudkan untuk mengelola dinamika sosial politik yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dapat dilihat jika sejak Orde Baru cukup banyak jumlah anggota militer yang dikaryakan pada bidang pemerintahan

ABRI pada masa Orde Baru selalu diikuti sertakan dalam program pembangunan, salah satunya yaitu " Adapun modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional ialah : (a) Kemerdekaan dan Kedaulatan bangsa, (b) Kedudukan geografi, (c) Sumber-sumber

kekayaan alam, (d) Jumlah penduduk, (e) Modal rohaniyah dan mental, (f) Modal budaya, (g) Potensi efektifitas bangsa, (h) Angkatan bersenjata.

Pada masa Orde Baru di bidang eksekutif ABRI menyumbangkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk melaksanakan tugas negara dan pemerintahan di banyak bidang mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, di pusat maupun daerah.

Di samping itu ABRI juga menyumbangkan gagasan dan fikirannya berupa konsep-konsep kepada pemerintah, maka ABRI sebagai kekuatan sosial politik selalu membantu pelaksanaan program-program Repelita untuk mencapai cita-cita Orde Baru.

Tugas yang pertama sebagai militer adalah melindungi seluruh bangsa tumpah darah Indonesia, wilayah kekuasaan negara serta kekayaan alam Indonesia, dan segala kepentingan-kepentingan negara Republik Indonesia dari unsur-unsur asing.

Peran pertama militer adalah peran pertahanan keamanan (Hankam) yaitu peran tradisional yang dijalankan oleh setiap kekuatan militer dimana saja didunia ini.

Militer menggunakan keterampilannya dan perlengkapan senjatanya yang dimilikinya untuk membela negara dan bangsa dari ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Pada kabinet pembangunan pada masa awal Orde Baru pejabat setingkat menteri pada awalnya yakni kabinet pembangunan pertama diisi oleh militer namun pada kabinet prmbangunan kedua peran militer di pejabat non-departemen dikurangi. Pangaruh militer dibidang birokrasi ini sangat besar sebab militer di pejabat non-departemen hubungan kerja maupun pelaksanaan keputusan langsung berhubungan dengan presiden.

Pada masa awal Orde Baru peran militer begitu besar dibidang pemerintahan.Maka sejak saat pengaruh militer mulai dirasakan dimana-mana yaitu dari badan-badan eksekutif dari pusat hingga daerah, badan-badan legeslatif dan yudikatif, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial politik, ekonomi bisnis dan sosial budaya.

Keberadaan militer pada jabatan setingkat menteri yakni pajabat non-departemen.Awalnya dalam usaha menjaga negara, karena keadaan negara pada saat itu baik keadaan sipil yang masih menjaga negara.Keadaan negara pada saat itu baik keadaan sipil yang masih lemah, keadaan politik belum stabil serta terjadi krisis ekonomi sehingga negara Indonesia belum stabil.Bahkan pada saat itu terjadi pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sehingga militer ditempatkan pada pejabat non-departemen.

Keberadaan pada jabatan non-departemen ini menambah besar dan memperkuat kekuasaan militer sebab koordinasi dan tanggung jawab langsung kepada presiden sehingga adanya kaitan ataupun hubungan yang lain menguntungkan antar militer dan presiden Soeharto pada masa awal Orde Baru.

Militer merupakan tentara nasional yang dibentuk untuk mempertahankan dan menjaga keamanan nasional baik ancaman dari negara luar maupun ancaman yang datang dari dalam negeri Indonesia sendiri.dan memiliki tugas dan peran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pada akhirnya militer menjadi kekuatan yang dikuasai disemua sektor.Para anggota militer seakan-akan merasa dirinya menjadi kelompok warga negara kelas satu yang menyandang berbagai hak istimewa itu akhirnya membangun pula tata nilai tertentu dalam lingkungan militer.

Selain itu juga militer sangat berkepentingan mempertahankan kekuasaan status quo Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.Sehingga militer sudah tidak lagi menjadi alat negara melainkan sudah menjadi alat kekuasaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :Selama Orde Baru militer melibatkan diri dalam berbagai macam aktifitas negara yaitu keterlibatan militer dalam politik semakin besar setelah kudeta 1965 yang merupakan tahap awal dari Orde Baru.

Dalam sebuah pemerintahan baik dalam tingkat nasional ataupun subnasional para perwira militer banyak yang mengambil ahli. Dibawah pimpinan Jendral Soeharto kekuasaan militer dalam politik semakin melebarkan sayapnya. Militer pada jabatan menteri setiap kabinet pembangunan pada masa awal orde baru hanya awalnya saja yaitu pada pembangunan pertama, banyak anggota militer yang menjabat sebagai pejabat setingkat menteri karena pada kabinet berikutnya jumlah militer semakin menurun. Keberadaan militer pada pejabat non-departemen sangat besar pengaruhnya di bidang birokrasi sebab pada pejabat non-departemen bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada masa awal Orde Baru dimana terdapat beberapa anggota militer yang memegang jabatan gubernur dan terlibatnya militer di departemen dalam negeri yaitu menjadi gubernur merupakan jabatan yang strategis sebab gubernur memiliki peran besar pada wilayah atau daerahnya yakni sebagai pengatur dan berhubungan langsung dengan pusat, sehingga militer pada masa awal Orde Baru memiliki peran besar dalam bidang sosial politik juga.

Masa Awal Orde Baru menunjukkan bahwa luasnya peranan militer dibidang non-hankam khususnya di bidang sosial politik.

Dimana pada masa awal Orde Baru terlibatnya militer bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik negara yang kemudian dijadikan alat penyaluran anggota militer diluar hankam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 1992. *Metode Penelitian*. Ghalia. Jakarta.

Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Budiarso, Eddy. 2000. *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa 77/78*. Grasindo. Jakarta

Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta

Departemen Pertanian. 1994. *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian*. PT. Citra Media Persada, Jakarta.

Jenderal Soeharto. 1967. *Orde Baru (Kutipan dari Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967)*. Grip. Surabaya

Manuel, Kaisiepo. 1987. Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jurnal Umum Politik 2. PT. Gramedia. Jakarta.

Mas'ood, Mohtar. 1987. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES. Jakarta

Moertopo, Ali. 2004. *Strategi Pembangunan Nasional Dalam Eka Nova Prasetya Pinem*. Kebijakan Politik Fusi : Suatu Tujuan Politik Kepartaian Rezim Orde Baru, FISIP, Universitas Sumatera Utara

Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari & Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*, Intidaya Press, Jakarta.

Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoenet Poesponegoro. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Depdikbud dan PN, Balai Pustaka. Jakarta

Notosusanto, Nugroho. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Rusli Karim, Muhammad. 1983. *Peranan ABRI Dalam Politik*. Yayasan Idayu. Jakarta

Samego, Indria. 1998. *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwifungsi ABRI*. Mirzan. Bandung

Soebijono, dkk. 1992. *Dwifungsi ABRI*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Soemardjan, Selo. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta

Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer*

Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI. LP3ES. Jakarta

Suprpto. Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Surachmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. ITB, Bandung.

Sumber Lain :

<http://deeaيدا88.blogspot.com/2010/12/dominasi-militer-dalam-birokrasi.html>. Diakses pada tanggal 21 September 2013, Pukul 20:02 WIB.